

SKRIPSI

**PERAN BUPATI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI KABUPATEN MAMUJU
(STUDI TENTANG BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020)**



Disusun Oleh:

FARAH LABITA RAMADANI

E041181018

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERAN BUPATI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI KABUPATEN MAMUJU
(STUDI TENTANG BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

FARAH LABITA RAMADANI

E041181018

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BUPATI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAMUJU

**(STUDI TENTANG BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

FARAH LABITA RAMADANI


E041181018

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada tanggal : 12 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

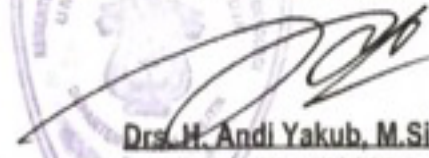

Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 197107051998032002

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 2008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN BUPATI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAMUJU

(STUDI TENTANG BUPATI PEREMPUAN PERTAMA DI KABUPATEN MAMUJU

TAHUN 2020)

Disusun dan Diajukan Oleh :

FARAH LABITA RAMADANI

E041181018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP.,M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Labita Ramadani

Nim : E041181018

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Bupati Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mamuju" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2022



Farah Labita Ramadani

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah "Peran Bupati Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Mamuju (Studi Tentang Bupati Perempuan Pertama Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020)". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Departemen Ilmu Politik.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis Bapak Saiful dan almh. Mama Yuli Restiwati yang sangat penulis cinta dan sayangi terimakasih juga kepada ibuku salmiati yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan kepada saudara penulis Farid, Farhat, Fatir, Er yang memberikan semangat kepada penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menggunakan

judul dalam penyusunan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat yang senantiasa bekerja keras demi kemajuan dan perubahan UNHAS yang makin cemerlang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan membawa berbagai perubahan yang membanggakan.
3. Dosen Penasehat Akademik Alm. Prof. Dr. Basri Syam. M.Ag., Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si., Prof. Muhammad. Yang telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan Dan kepada dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si dan ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si dan juga kepada dosen penguji skripsi penulis bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.
4. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah memberi ruang kepada penulis untuk mengembangkan minat keilmuan pada Ilmu Politik dan membantu kelancaran administrasi akademik.

5. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., Dr. Muhammad Saad, M.A., Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah mencurahkan banyak ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran kehidupan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Hamzah, S.Sos., Bapak Syamsuddin, S.T dan Ibu Musriati S.E., Ak., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
7. Terimakasih kepada bupati mamuju dan segenap staf kantor bupati yang telah membantu administrasi agar penulis dapat meneliti dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Terimakasih kepada kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten mamuju dan segenap staf kantor PPPA yang telah membantu.
9. Terimakasih juga aktifis perempuan dan masyarakat mamuju yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

10. Tak lupa juga penulis hanturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang terkasih Muhaimin Martono yang telah senantiasa sabar dan banyak membantu selama proses proposal sampai skripsi ini selesai.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 Ilmu Politik yang telah mewarnai kehidupan penulis, memberi dukungan dan motivasi selama proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
12. Dosen Pendamping KKN UNHAS Gelombang 106 Wilayah Sulawesi barat 1, Bapak Abdur Rahman Arif, S.Si., M.Sc. yang membina penulis selama KKN Dan Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gelombang 106 Wilayah Sulawesi Barat 1, khususnya di Posko Mamuju yang sudah baik dan mendukung penulis selama KKN.
13. Sahabat-sahabat tercinta penulis selama kuliah di ilmu politik fisip, penuh cinta dan semangat selalu mendukung disaat suka maupun duka, Ada ORMADO (Nurul shinta, Shafirah, Novia, Falih, Shalsahirah, Batari, Nabeng, Jihan, Kak sofia), Anggy, Aulia, Amirah, Moris
14. Sahabat-sahabat tercinta penulis, penuh cinta dan semangat yang selalu mendukung disaat suka maupun duka ada Shasa Khairunnisa ,Zhafirah A, Nabila Aulia A, Faradhilla H, Sri Qhovifa A, Wanda Pratiwi, Kiky Manjayanti , Dewi Shinta, Nina Maamun, Chesya M,

dan Icha Thalib

15. Teman-teman, kakak-kakak himapol terkhususnya kak Anggun Paradina yang telah memberikan saran judul kepada penulis dan kak Arina yang membantu dan memberikan motivasi selama jadi maba dan dapat bergabung di himapol.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 23 Agustus 2022

Farah Labita Ramadani

ABSTRAK

Farah Labita Ramadani, Nomor induk E041181018, departemen ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas hasanuddin, menyusun skripsi yang berjudul "Peran Bupati Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Mamuju (Studi tentang bupati perempuan pertama di kabupaten Mamuju tahun 2020). Di bawah bimbingan Ariana Yunus selaku Pembimbing Utama dan Sakinah Nadir selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin. Penelitian ini berfokus pada upaya bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender di kabupaten mamuju dengan penelitian ini dapat dilihat peran seorang bupati perempuan dalam merespon pengarusutamaan gender dimasa kepemimpinannya.

Untuk memberi penjelasan serta makna terhadap temuan pada penelitian, studi ini menggunakan teori peran pemimpin perempuan sebagai kepala daerah dalam konsep pengarusutamaan gender oleh Robert K. Merton dengan 5 fungsi yang dijelaskan yaitu: *Leading, Planning, Budgeting, Organizing* dan *Controlling*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui, menganalisis dan memahami jenis studi tentang bupati perempuan pertama di Kabupaten Mamuju serta proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bupati mamuju telah berkomitmen dengan pembuatan program kartu mamuju keren yang dimana kartu tersebut database masyarakat mamuju kartu mamuju keren berhubungan dengan BPJS untuk masyarakat mamuju yang dimana anggaran tersebut dari APBD dan bupati mamuju telah menunjukkan peran bupati perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan gender di kabupaten mamuju dengan merancang peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, yang melibatkan beberapa perempuan menjadi kepala OPD di kabupaten mamuju.

Kata Kunci : Peran pemimpin, Bupati perempuan, Pengarusutamaan gender.

ABSTRACT

Farah Labita Ramadani, Number E041181018, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled “The Role of the Regent of Women in Mainstreaming Policies Gender in Mamuju District (Study on the first female district head Mamuju Regency in 2020). Under the guidance of Ariana Yunus as the Main Advisor and Sakinah Nadir as a Companion Advisor.

The research aims to find out and understand how female district heads respond to gender mainstreaming policies in carrying out their roles as leaders. This research focuses on the efforts of female regents to respond to gender mainstreaming policies in Mamuju district. This research can see the role of a female regent in responding to gender mainstreaming during her leadership period.

To provide an explanation and meaning for the research findings, this study uses the theory of the role of women leaders as regional heads in the concept of gender mainstreaming by Robert K. Merton with 5 functions explained, namely: Leading, Planning, Budgeting, Organizing and Controlling. The research approach used in this study is a descriptive qualitative approach to find out, analyze and understand the type of study on the first female regent in Mamuju Regency and the data collection process was carried out through interviews and documentation.

The results of this study show that the mamuju regent has committed to the creation of a cool mamuju card program where the card is a database of the mamuju community, the cool mamuju card is related to BPJS for the mamuju community where the budget is from the APBD and the mamuju regent has shown the role of the female regent in responding to the gender mainstreaming policy in the mamuju district by drafting a local regulation on women's empowerment and protection, which involves several women becoming opd heads in mamuju district.

Keywords: Role of leaders, Women regents, Gender mainstreaming (PUG).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Tinjauan Teoritis	14
2.2.1 Peran Pemimpin.....	14
2.2.2 Peran Perempuan Sebagai Kepala Daerah	18
2.2.3 Konsep Pengarusutamaan Gender.....	21
2.2.4 Kerangka Berpikir.....	24
2.2.5 Skema Penelitian	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Pendekatan, Tipe, dan Jenis Penelitian	26
3.2.	Lokasi dan Objek Penelitian	28
3.3.	Jenis dan Sumber Data	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5	Informan Penelitian.....	32
3.6	Teknik Analisis Data	33

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Mamuju.....	36
4.1.1	Gambaran Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju	38
4.2	Kependudukan Kabupaten Mamuju	38
4.2.1	Jumlah Penduduk Berbagai Kec. Di Kab. Mamuju.....	39
4.3	Dinamika Politik Pemerintahan Kab. Mamuju	40
4.4	Profil Ibu Bupati Perempuan	42

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1	Sutinah sebagai bupati perempuan.....	45
5.2	Peran bupati sebagai pemimpin perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan gender.....	47
5.2.1	Peran bupati dalam <i>Leading</i>	47
5.2.1.1	Rancangan Perda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	49

5.2.2 Peran bupati dalam <i>Planning</i>	51
5.2.3 Peran bupati dalam <i>Budgeting</i>	55
5.2.3.1 Tabel Anggaran Kartu Mamuju Keren	
Tahun 2022	56
5.2.4 Peran bupati dalam <i>Organizing</i>	60
5.2.4.1 Tabel kepala OPD kab.Mamuju	62
5.2.5 Peran bupati dalam <i>Controlling</i>	66

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
-------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan seseorang dan pengambilan keputusan dilingkup yang sangat luas dimulai dari institusi dalam keluarga sampai ke institusi politik formal tinggi. Politik yang di identikkan oleh laki-laki bahwa kekuasaan selama ini Laki-laki yang kerap kali menjadi simbol kepemimpinan dan perempuan yang selalu diidentikkan dengan keindahan, kelembutan, bahkan kelemahan. Tidak jarang identitas gender tersebut dijadikan sebagai perbedaan utama antara laki-laki dan perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak hanya laki-laki yang memiliki kemampuan untuk memimpin namun peran perempuan sudah mulai diperbincangkan. Keberhasilan dari sebuah kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh gen namun efektivitas dan kualitas dari gaya kepemimpinan yang diterapkannya adapun Perbedaan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan telah ditepis oleh kiprah kepemimpinan perempuan dalam berbagai peran dan posisi strategis di kehidupan bermasyarakat.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan adalah bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai

manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik. Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan pernyataan yang telah dijelaskan di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pemimpin perempuan dalam pemerintahan sangat bisa meningkatkan kinerja sangat baik karena pemimpin perempuan berusaha meningkatkan kualitas kerja agar menjadi contoh yang baik dan pemimpin perempuan dapat memberi motivasi kerja dan menjaga hubungan sosial yang baik oleh karena itu pemimpin perempuan tidak menjadi masalah di era demokrasi ini kewajiban perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia dan Peran pemimpin bukan semata-mata sebagai sebuah tonggak berjalannya suatu program dalam pemerintahan namun juga menjadi pemersatu antara masyarakat yang dipimpinnya.

Meskipun saat ini masih banyak terjadi perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, namun jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai perumus dan pelaksanaan kebijakan negara semakin bertambah. Persoalannya, perkembangan posisi dan peran perempuan sangat lamban dan posisi dilembaga pemerintahan sangat kurang proporsional. Tapi tak semua perempuan dapat diakui

sebagai pemimpin, hanya perempuan yang memenuhi standar kepemimpinan laki-laki yang dapat diakui efektivitasnya, persentase wanita sebagai pemimpin jika dibandingkan dengan persentase laki-laki sebagai pemimpin.¹ Jumlah wanita di Indonesia yang melebihi separuh dari jumlah penduduknya merupakan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang luar biasa, namun menjadi tidak bermakna ketika pemerintah dan semua lembaga terkait tidak dapat memberikan program dan peran yang optimal dalam masyarakatnya.²

Pandangan masyarakat mengenai status perempuan hanya sebagai pendamping dan tidak dapat membuat keputusan dengan sifat emosionalnya menyebabkan kehadiran perempuan pemimpin sangat jarang, sehingga ungkapan seorang pemimpin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki melekat dalam kehidupan masyarakat luas.³ Dan dari hasil laporan dan kajian keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dilembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan laki-laki.

Gender didefinisikan juga sebagai perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga konsep mengenai

¹ Bass dan Klenk dalam Mangunsong, 2009.

² Setiawati (2012).

³ Dalam buku pembangunan manusia berbasis gender (2013).

gender belum tentu sama di suatu tempat dengan tempat lainnya serta dapat berubah dari waktu ke waktu.⁴ Sejalan dengan itu, Fakhri (2006: 71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.⁵ Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi permasalahan selama konsep kesetaraan gender dan keadilan gender berjalan dengan baik. Dengan begitu pengarusutamaan gender sangat penting di Sulawesi Barat karena perempuan bukan hanya sebagai obyek dalam pembangunan dan pengambilan keputusan ataupun menentukan kebijakan, namun perempuan bisa menjadi subyek.

Maka dari kebijakan tentang pengarusutamaan gender atau kesetaraan gender perempuan mendapatkan akses, kesempatan dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dalam setiap aspek yang ada. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam dunia politik diharap harus berperan penuh dan saling mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik tentunya memiliki modal social dari calon perempuan, baik secara kualitas, kredibilitas, dan

⁴ H.T. Wilson (1989:2), *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, Kobenhavn, Koln: E.J Brill.

⁵ Mansour Fakhri (2006: 71), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 71.

profesionalitas agar bisa tampil dan percaya diri. Perempuan dalam politik juga harus memiliki dukungan dari partai politik, tapi jika partai politik hanya memperhatikan aspek kuantitas, bisa jadi aspek kualitas calon tidak terseleksi secara maksimal.

Di era Demokrasi, peranan dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Dengan melihat banyaknya perempuan yang menjadi pemimpin, di Sulawesi barat juga terdapat pemimpin perempuan yaitu Hj. Enny Angreani Anwar sebagai wakil gubernur Sulawesi Barat dan juga ibu suraidah suhardi yang kedudukannya menjadi ketua DPRD provinsi Sulawesi barat yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang mesti dihadapi oleh kaum perempuan adalah merubah paradigma tentang perempuan yang sering dipandang sebagai pihak yang didominasi, salah satu cara untuk mengubah paradigma tersebut adalah dengan terus memperbaiki diri karena dengan cara tersebut, sebagai perempuan bisa membuktikan kepada khalayak bahwa perempuan bisa dengan terus memperbaiki kualitas diri, paradigma di atas dengan sendirinya akan hilang, kiprah perempuan di dunia politik benar-benar di manfaatkan dengan baik.

Dapat ditunjukkan dengan kualitas diri, bahwa perempuan juga bisa ambil andil di ranah politik, dengan begitu perempuan

harus memperbaiki diri dan membuktikan bahwa perempuan juga bisa melakukan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin. Gender merupakan kata yang dapat diartikan sebagai peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat secara turun temurun yang berhubungan dengan fungsi, peran dan tanggung jawab sosial di masyarakat. Namun kebudayaan yang berkembang di masyarakat pada umumnya menafsirkan perbedaan biologis menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kelayakan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya yang pada akhirnya membedakan hak-hak, sumber daya dan kuasa antar laki-laki dan perempuan.

Adapun hal yang menarik di bahas di Kabupaten Mamuju adalah karena pada saat tahun 2020 pemilihan Bupati Mamuju tercatat dalam sejarah untuk pertama kalinya di Sulawesi Barat dan tepat di Kabupaten Mamuju terpilih tokoh perempuan pertama yang menjadi Bupati Mamuju, dan dengan terpilihnya Sutinah Suhardi sebagai bupati dengan latar belakang anak dari mantan Bupati Mamuju yang pernah menjabat selama 2 periode tentu membuat Sutinah Suhardi menjadi percaya diri untuk ikut bertarung di pemilihan Bupati Mamuju tahun 2020. Masyarakat Mamuju tidak heran lagi dengan sosok perempuan yang menjadi pemecah rekor di Kabupaten Mamuju karena sebelum menjabat bupati, Sutinah Suhardi adalah tokoh perempuan yang telah aktif di organisasi

kemahasiswaan 2002 hingga 2004 dirinya aktif sebagai anggota AMPI (Angkatan Muda Persatuan Indonesia), 2002 hingga 2005 aktif sebagai anggota HMI. Pada 2018 Sutinah Suhardi terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mamuju Sulbar hingga 2022.

Sutinah Suhardi sebelum menjabat Bupati Mamuju pernah menjadi ASN di Kabupaten Mamuju dan pernah menjabat sebagai kepala dinas, maka dari itu masyarakat Kabupaten Mamuju telah mengenal sosok Sutinah Suhardi yang memiliki modal sosial karena sikap merakyat dan kepeduliannya dengan masyarakat sehingga masyarakat menyukai pribadi Sutinah Suhardi dan memilihnya sebagai bupati mamuju lewat pemilihan bupati tahun 2020, dan dengan terpilihnya menjadi bupati Mamuju sangat membantu masyarakat Mamuju karena melihat kondisi Mamuju saat ini mengalami kemunduran, seperti angka kemiskinan, Kesehatan dan kualitas Pendidikan sangat menurun, maka dari itu masyarakat menyuarkan hak pilihnya untuk Sutinah Suhardi. Dengan cara menarik perhatian masyarakat Mamuju Sutinah Suhardi melakukan kampanye langsung ke masyarakat dan melihat kondisi masyarakat Mamuju.

Adapun pandangan masyarakat Mamuju tentang pemimpin perempuan yaitu, Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya dan

masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu melancarkan jalannya pemilihan bupati yang demokratis. Dengan terpilihnya Sutinah Suhardi, dalam sudut pandang masyarakat Mamuju tentang perempuan menjadi pemimpin yaitu dengan mempunyai bupati perempuan adalah hal yang lumrah dan tidak ada yang ganjil jika perempuan yang pemimpin, kita sebagai masyarakat Mamuju memilih pemimpin dengan melihat kebijakannya kedepan, dengan banyaknya pemimpin perempuan ada beberapa faktor yang bisa kita bedakan antara ruang publik sebagai perempuan dan laki-laki jika kalau kita ukur dari keseharian perempuan tidak bisa lepas dari kegiatan rumah tangga akan tetapi kegiatan publik juga tidak bisa kita lepaskan karena sejarah perempuan menjadi pemimpin bahkan kita bisa lihat Indonesia pernah dipimpin oleh perempuan yaitu ibu Megawati sudah bukan hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia sudah ada egaliter antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang publik.

Ada hal yang membedakan dari faktor psikologi kepribadian secara ideologi politik bahwa jika laki-laki pemimpin dan jika perempuan jadi pemimpin menunjukkan kepribadian bahwa ada kebijakan publik yang berasal dari kepribadiannya yang mempunyai sifat emosional seketika perempuan jadi pemimpin di instansi atau suatu daerah, dan jika laki-laki jadi pemimpin ada suatu hal yang

berbeda karena penggunaan struktural pemikiran akal sedangkan perempuan mengedepankan emosional behavior, akan tetapi yang kita lihat fakta di lapangan bahwa kesamaan kebijakan akan di tampuk melalui kepemimpinan yang ada kalau perempuan juga kita tidak bisa anggap remeh dalam kepemimpinannya baik secara tingkat bupati sampai presiden sudah kita lihat sendiri hasil kinerja perempuan sangatlah baik terkhususnya di Kabupaten Mamuju dengan di pimpin oleh Sutinah Suhardi dengan kinerja 100 hari sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu atas dasar pemikiran di atas, penulis bermaksud dan ingin meneliti bupati perempuan pertama di mamuju dengan judul “Peran Pemimpin Perempuan Dan Keberpihakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender”

1.2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang tersusun diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Bupati Perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan gender?

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan Rumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin.

1.3. Manfaat Penelitian:

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat teoritis, yaitu memperluas pengembangan ilmu bagi pembaca terkhususnya penulis untuk mengetahui dan memahami bagaimana bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bupati perempuan merespon kebijakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, terdiri 2 bagian yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang di gunakan oleh penulis sebagai alat menganalisa fenomena dalam penelitian ini. Adapun teori peran yang digunakan penulis didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.⁶

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya bagi penulis untuk mencari referensi atau perbandingan penelitian yang penulis lakukan dengan berjudul “Peran Bupati Perempuan dalam merespon kebijakan Pengarusutamaan Gender”. Dengan berbagai literatur Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

- 1. Dalam Penelitian Eraisha Valensi (2015) “Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM Dalam Perencanaan dan Penggaran Responsif Gender (PPPG) Pada APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013”** Penelitian ini membahas tentang peran bupati

⁶ Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka. Mengutip dari Merton, Robert K. 1967. *On Theoretical Sociology*, New York: The Free Pass.

daam perencanaan dan penggaran responsive gender yang dimana penelitian ini dan penulis teliti mempunyai kesamaan yaitu dengan melihat peran bupati perempuan tentang responsif gender dan penggunaan teori yang sama dari teori peran Robert K. Merton Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan.

- 2 Dalam penelitian Adrianus Jacobu (2016) “Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”.** Penelitian ini membahas tentang peran seorang anggota DPRD perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di kab. Kepulauan siau dalam hasil penelitian ini anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro secara keseluruhan berjalan baik, Keberhasilan program selalu di upayakan pada pencapaian maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan yaitu anggota dprd perempuan, penelitian ini menggunakan konsep keterwakilan perempuan dalam politik yang bertujuan untuk mengetahui bahwa masih kurangnya respon anggota DPRD perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Pada UUD 1945 Pasal 28 jelas mengatakan

pengakuan Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada batasan. Sehingga hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum dengan meratifikasi dengan berbagai konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan.

3. **Dalam penelitian Haura Atthahara , Evi Priyanti (2019) “*Perempuan Kepala Daerah : Analisis Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender Di Kabupaten Karawang*”.** Penelitian ini membahas Bupati perempuan pertama di Karawang yang terpilih untuk periode 2016-2020. Kepentingan-kepentingan strategis gender (perempuan) muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang, dimana perempuan berada pada posisi ter subordinasi. Penelitian ini berfokus bagaimana program Bupati Karawang dalam memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu serta kebijakan strategis apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi dan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori demokrasi dan konsep keterwakilan kepentingan berbasis gender

yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Peran Pemimpin

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang atau sekelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang di bebankan kepadanya.

Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia

ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika di pisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Peran (*Role*) merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. sekumpulan harapan atau prilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau prilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu ataupun kelompok-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Pemimpin adalah agen perubahan, seorang yang bertindak untuk mempengaruhi orang lain, sementara perbuatan kepemimpinan terjadi apabila seorang anggota kelompok melakukan modifikasi terhadap motivasi atau kompetensi orang lain di dalam kelompok tersebut. Pemimpin yang merupakan agen

perubahan haruslah menjadi panutan pada setiap anggota yang dipimpinya, karena setiap anggota akan menaruh harapan-harapan pada pemimpinnya. Seorang pemimpin harus mampu merespon perubahan yang terjadi secara konstan dan memimpin organisasi yang menaunginya, tidak sekadar bertahan hidup tetapi merekonstruksi struktur, fungsi, dan metode yang dapat menghantarkan organisasi secara efektif dan efisien meraih visi dan misi yang ingin dicapainya.

Pemimpin perempuan selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Meskipun secara teoritis, filosofis, teologis, dan hukum memiliki legitimasi yang kuat. Tak terkecuali dalam bidang politik, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Padahal, setengah jumlah penduduk Indonesia ialah perempuan dan mayoritas mereka sebagai pemilih (voters) dalam pemilu Landasan konstitusional yang bisa dijadikan dasar atas hak politik perempuan menyatakan, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".⁷ Selain itu, terdapat juga peraturan yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan pada legislatif.⁸ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

⁷ Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945

⁸ UU Parpol No 2/2008 dan UU Pemilu No 7/2017

(CEDAW), menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin dan menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Konsep kepemimpinan perempuan Beberapa studi memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam gaya (style) kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan.

Berbicara mengenai peranan perempuan, dewasa ini menjadi sebuah hal penting yang mulai diperhitungkan dan dibutuhkan di sektor publik, baik dibidang ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, dan khususnya dalam bidang pemerintahan, tentu tidak lain bertujuan untuk memajukan kualitas negara agar mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata, salah satunya melalui bentuk representasi dari masyarakat tanpa membedakan gender .

Peran pemimpin perempuan yang penulis fokuskan yaitu peran bupati perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan gender. Adapun teori peran yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

⁹Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

⁹ Ibid. Hal. 11

Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.”

2.2.2 Peran Perempuan Sebagai Kepala Daerah

Peran Perempuan Sebagai Kepala daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Pemerintah daerah adalah kepala daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Kepala daerah wilayah kabupaten disebut dengan Bupati.

Kepala Daerah bukan semata-mata kekuasaan yang kebanyakan berujung pada kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah. Maka kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggungjawab kepemimpinan pada level manapun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apapun, baik sebagai pemimpin

pemerintahan, lembaga maupun masyarakat.¹⁰ Kepala Daerah perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat.

Kepala daerah seorang perempuan ataupun laki-laki tidak hal yang membedakan dalam kepemimpinannya Perempuan menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu masalah apabila perempuan tersebut memang memiliki kompetensi, karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menduduki kursi kepemimpinan. ini membuktikan bahwa perempuan juga dapat mengambil peran serta dalam memimpin suatu daerah atau lembaga sebagaimana seorang laki-laki berperan dalam membangun bangsa dan negara. Perempuan sebagai kepala daerah dapat memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk mengembangkan diri agar bisa memasuki ranah politik dan mensejahterakan kaum perempuan di daerahnya dengan adanya kebijakan ataupun program-program pengarusutamaan gender.

Dengan begitu penulis fokus kepada Bupati mamuju karena bupati adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh

¹⁰ Suyatno. (2014). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 355.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377>

pemerintah daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Oleh karena itu Bupati mempunyai peran dan fungsi untuk merespon kebijakan pengarusutamaan gender sebagai berikut:

A. *Leading*

Leading merupakan pengambilan suatu keputusan, mengadakan komunikasi agar saling mengerti antara pemimpin dan bawahan.

B. *Planning*

Planning adalah merencanakan, saat seseorang ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, maka tentulah harus memikirkan Langkah-langkahnya secara matang agar tujuan tersebut bisa tercapai.

C. *Budgeting*

Budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Rencana pengeluaran ini disebut anggaran.

D. *Controlling*

Controlling adalah pengawasan, maksudnya yaitu proses dilakukannya pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan untuk menjamin supaya pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

E. Organizing

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi.

2.2.3 Konsep Pengarusutamaan Gender

Di era sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus penyimpangan, yang paling banyak kita temui adalah penyimpangan gender. Banyaknya sekali kasus dan bentuk penyimpangan gender membuat kita resah, terutama bagi kaum perempuan. Para kaum perempuan sangat dikucilkan dan dilecehkan oleh oknum-oknum yang tak tau diri dan tidak bertanggung jawab, mulai dari aspek karir dan lingkungan. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Dengan begitu pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang

sama dalam berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di bidang politik masih terdapat ketimpangan gender sehingga diperlukan upaya meningkatkan pendidikan politik bagi partisipasi seluruh warga negara baik laki-laki atau perempuan, Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.¹¹

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada intinya hanya dimaknai dalam beberapa gagasan dan kepentingan sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dimaksudkan sebagai strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan.
- b. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah gerakan dinamis yang bermuatan analisis kultural, sosial dan politik. Ia melibatkan dan meniscayakan perubahan relasi gender, dari

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 27 tahun 2010.

model hubungan atas bawah, paternalistic ke model relasi kemitraan dan kesetaraan. Semuanya pada intinya harus bermuara pada kegiatan untuk mencapai keseimbangan dan kemitraan kekuasaan, dan tanggung jawab mutual yang menguntungkan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

- c. Pengarusutamaan Gender (PUG) mengharuskan perwujudan proyek program dan beragam kebijakan untuk mempromosikan, mendorong dan mendukung perubahan peran gender laki-laki dan perempuan, sikap dan perilaku; yaitu perubahan yang lebih menyuarkan panggilan keadilan gender baik di lingkup domestic ataupun public.
- d. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi tanggung jawab bersama, semua komponen kunci pembuat kebijakan, baik di level perencanaan, pembuatan sampai ketinggian penegakan kebijakan tersebut. Negara bersama rakyat, baik kolektif atau individual dituntut harus bahu membahu turut berpartisipasi untuk program ini.

Adapun peraturan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang membahas tentang terlakunya pengarusutamaan gender disebuah daerah maupun di Indonesia maka daripada itu pemerintahan daerah provinsi Sulawesi barat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh

proses pembangunan daerah.¹² Pengarusutamaan Gender (PUG) lahir dari usaha kelompok pejuang perempuan untuk lebih memberdayakan kaum perempuan. Dari berbagai sisi, selain sebagai refleksi, semangat simpati dan empati kepada nasib tragis kaum perempuan, proyek ini lahir dari panggilan suci untuk menegakkan keadilan lintas katagori gender. Pengarusutamaan Gender (PUG).

2.2.4 Kerangka Berpikir

Kabupaten Mamuju kini memiliki bupati baru. Dia adalah Hj. St. Sutinah Suhardi, bupati perempuan pertama di kabupaten yang berjuluk mamuju keren karena bupati menciptakan kartu mamuju keren yang dimana kartu itu berfungsi untuk menjadi database masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mau melihat Sutinah sebagai bupati mamuju dengan menjalankan tugasnya sebagai bupati. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Robert K. Merton untuk melihat bagaimana bupati perempuan menjalankan perannya dalam merespon kebijakan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Mamuju.

¹² Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang pengarusutamaan gender nomor 10 tahun 2020

2.2.5 Skema Penelitian

